

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, sesuai dengan perkembangan perekonomian. Pemerintah dan pertumbuhan adalah unsur-unsur mutlak dari perkembangan ekonomi dan harus merupakan sasaran dari koperasi dalam melaksanakan fungsi sosial-ekonominya apalagi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Dalam hal ini koperasi merupakan salah satu cara yang tepat untuk mewujudkannya.

Koperasi merupakan badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang semua anggota terdiri dari perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing di mana setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang akan di ambil.

Koperasi tumbuh dari kalangan masyarakat yang menderita ekonomi sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme yang semakin memuncak. Beberapa orang yang hidupnya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas. Terdorong oleh beban ekonomi yang sama secara spontan mempersatukan diri untuk menolong diri sendiri sehubungan dengan itu, peran koperasi sangat penting karena dalam melaksanakan ekonomi secara bersama-sama dapat menggalang kekuatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3 dan 4 di jelaskan bahwa koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang didemokrasikan dan berkeadilan .

Kegiatan koperasi berorientasi pada usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usahanya dan kesejahteraan anggotanya. Koperasi saat ini menjadi salah satu roda pergerakan ekonomi rakyat terutama ekonomi menengah bawah. Hal ini dilihat dari peran koperasi dalam rangka menyediakan modal kerja bagi usahawan kecil, koperasi merupakan tempat atau wadah bagi para anggota koperasi untuk mendapat pinjaman dalam bentuk pemberian tambahan usaha, pemberi pinjaman uang, pinjaman pembelian barang yang lainnya. Bagi koperasi semua unit usaha dapat meningkatkan permodalan koperasi.

Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli adalah salah satu koperasi yang wilayah kerjanya berada di Provinsi Jawa Barat. Adapun perkembangan anggota di Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Perkembangan Anggota Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli

Tahun	Jumlah Anggota Awal Tahun (Orang)	Perkembangan		Jumlah Anggota (Orang)	N/T %
		Anggota Masuk (orang)	Anggota Keluar (orang)		
2016	210	13	3	10	-
2017	214	17	13	4	1,90
2018	246	66	34	32	14,95
2019	268	49	27	22	8,94

Sumber :Laporan Rapat anggota Tahunan KPDK 12 Juli tahun buku 2016 sampai 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan jumlah anggota Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli” Tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi.Hal ini dikarenakan jumlah anggota yang masuk dan anggota yang keluar cukup banyak.Seperti diketahui pada tahun 2017 jumlah selisih anggota masuk dan anggota keluar sebanyak 4 orang dengan presentase sebanyak 1,90% Jumlah anggota pada tahun 2018 bertambah sebanyak 32 orang dan presentase mengalami peningkatan presentase sebesar 14,95%. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah anggota mengalami penurunan sebanyak 22 orang dengan presentase sebesar 8,94%.

Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 juli mempunyai 4 unit usaha

Sebagai berikut:

1. Unit Warung Serba Ada

Keberadaan unit waserda di Kopersai Pegawai Dinas Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli sangat membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk minum panas, dan dingin, serta makanan/ cemilan.

2. Unit Fotocopy

Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli berada dilingkungan kantor Dinas Koperasi, dimana kebutuhan pegawai Dinas Koperasi, dimana kebutuhan pegawai Dinas Koperasi untuk memfotocopy ataupun menjilid dokumen dapat terpenuhi dengan mudah.

3. Unit Rental Kendaran

Kopoerasi Pegawai Dnas Koperasi (KPDK) 12 Juli memulai usaha rental kendaraan pada tahun 2014 yang digunakan untuk kebutuhan anggota, untuk saat ini mobil yang bisa direntalkan sebanyak 1 unit.

4. Unit Simpan Pinjam

Unit Simpan Pinjam yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli diperuntukan untuk anggota Koperasi.

Kegiatan koperasi unit simpan pinjam diatur dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1995 yang menyatakan bahwa “Kegiatan usaha koperasi unit simpan pinjam adalah:

- a. Menghimpun simpanan dari anggota dan calon anggota koperasi
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan dan anggotanya dan
- c. Mengelola keseimbangan sumber dana penyaluran pinjaman.

Dilihat dari adanya unit simpan pinjam yang siap memberikan dan menyalurkan dana kepada anggota tersebut, maka koperasi pasti akan memberikan pinjaman kepada anggota maupun non anggota yang akan menimbulkan adanya piutang dari anggota dan non anggota tersebut. Piutang merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang tercantum dalam neraca. Didalam piutang tertanam sejumlah investasi yang terdapat pada aktiva lancar lainnya. Untuk itu pengelolaan piutang memerlukan perencanaan yang matang, mulai dari penjualan kredit yang menimbulkan piutang sampai menjadi kas. Investasi yang terlalu besar menimbulkan kecil atau lambatnya perputaran modal kerja, sehingga semakin kecil pula kemampuan perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan. Akibatnya semakin kecilnya kesempatan yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba.

Oleh karena itu pengendalian terhadap piutang merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan oleh perusahaan. Sistem pengendalian piutang yang baik akan mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Misalnya banyak piutang yang menunggak karena lemahnya kebijakan pengumpulan dan penagihan piutang.

Analisis pengelolaan piutang di perlukan koperasi untuk kelangsungan hidup koperasi. Ketidakberhasilan koperasi dalam pengelolaan piutang akan mempengaruhi kelancaran koperasi dalam menjalankan usahanya. Koperasi harus dikelola dengan lebih efisien dan profesional, dengan begitu koperasi tidak mengabaikan keuntungan atau SHU yang di peroleh dari hasil pemberian dan pinjaman.

Adapun Kolektibilitas Pijaman pada KPDK 12 Juli dari tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Peraturan Negara Koperasi dan Usaha dapat dilihat Pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Kolektibilitas Pinjaman Bermasalah Pada KPDK 12 Juli

Tahun	Lancar (Rp)	Kurang lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)
2015	2.865.357.134	950.340.270	504.320.980	350.192.770
2016	2.592.435.183	784.188.925	780.510.002	302.195.000
2017	2.604.210.758	850.200.190	485.888.552	312.014.000
2018	2.906.037.268	950.710.340	780.120.350	482.029.935
2019	2.338.038.211	795.331.357	509.953.025	959.957.407

Sumber: Data Angsuran Tahun 2015-2019 KPDK 12 Juli

Fenomena masalah yang terjadi di Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli saat ini adalah terjadinya piutang macet yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Adapun data perkembangan piutang Koperasi Pegawai Dinas Koperasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Perkembangan Piutang Macet Pada KPDK 12 Juli

Tahun	Pinjaman di salurkan (Rp)	Piutang Macet (Rp)	Presentasi Piutang Macet %
2015	4.670.211.154	350.192.770	7.49
2016	4.750.000.000	302.195.000	6.36
2017	4.252.313.500	312.014.000	7.34
2018	5.118.897.895	482.029.935	9.42
2019	3.603.280.000	959.957.407	26.64

Sumber: RAT KPDK 12 Juli 2015-2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah piutang macet piutang dari tahun ke tahun mengalami Peninkatan setiap tahun . Pada tahun 2016 jumlah piutang macet sebesar Rp 302,195,000 dengan presentase piutang macet 6,36%. Pada tahun 2017 jumlah piutang macet meningkat sebesar Rp 312,014,000 dengan presentase piutang macet 7,33% . Pada tahun 2018 jumlah piutang macet meningkat sebesar Rp 482,029,935 dengan presentase piutang macet 9,42% .Pada tahun 2019 Jumlah piutang macet meningkat sebesar Rp 959,957,407 dengan presentase piutang macet 26,65%

Dalam kegiatan usaha Koperasi apabila piutang macet mengalami peningkatan terus menerus maka akan berdampak pada aktivitas ekonomi koperasi, karena piutang merupakan salah satu modal kerja. Selain itu juga tingkat perputaran piutang menjadi bahan acuan kecepatan konversi piutang menjadi kas. Dan apabila laba mengalami penurunan akan berpengaruh pada kelangsungan Koperasi.

Koperasi harus mampu dalam mengontrol piutang yang akan di berikan kepada anggota agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelunasan yang akan mengakibatkan adanya piutang macet. Oleh karena itu untuk meminimalisir tingkat piutang macet, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengendalian internal pada piutang.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli di unit simpan pinjam adalah terjadinya piutang macet disebabkan piutang yang tidak dapat dibayar oleh debitur dikarenakan berbagai alasan salah satu alasannya adalah Permohonan kredit debitur/debitur melebihi kemampuan dari pendapatan penerimaan kredit sehingga kewajiban untuk membayar ke Koperasi KPDK 12 Juli berkurang dan bahkan menyebabkan piutang macet ditambah lagi dengan kurangnya pengendalian dalam menganalisis pinjaman yang di berikan kepada debitur, kemungkinan salah satu penyebab meningkatnya piutang macet di Koperasi Pegawai Dinas Koperasi 12 Juli yaitu belum terlaksana dan belum berjalan dengan semestinya pengendalian internal pada piutang di kopersai. Pengendalian internal piutang sangat penting untuk di terapkan agar dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam suatu siklus kerja yang dapat merugikan koperasi.

Pemberian kredit di Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli mempunyai persyaratan yaitu Peminjam merupakan karyawan Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli, Peminjam merupakan anggota Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli, Peminjam memiliki saldo berupa simpanan

wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, Peminjam memberikan jaminan, Peminjam menyatakan maksud dan tujuan melakukan pinjaman.

Adapun mekanisme pinjaman di Koperasi Pegawai Dinas Koperasi 12 Juli sebagai berikut:

Gambar 1.1 Mekanisme Pinjaman Di Koperasi Pegawai Dinas Koperasi 12 Juli.



Sedangkan untuk proses piutang yang dilakukan oleh bagian penagihan dibuktikan dengan kuitansi pembayaran. Adapun prosedur penagihan piutang dilakukan oleh pihak Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPKD) 12 Juli dengan cara pemberian surat peringatan pertama dan kedua, menelpon anggota yang bersangkutan. Apabila dalam dua kali diberi surat panggilan berturut-turut tidak hadir maka petugas mendatangi rumah anggota yang meminjam.

Pengendalian piutang merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh koperasi dalam menangani kemungkinan resiko yang dapat terjadi, dimana koperasi membatasi besarnya pinjaman yang akan di berikan kepada anggotanya untuk mencegah besarnya resiko yang mungkin timbul sebagai akibat penjualan kredit itu sendiri namun adanya unsur resiko dan ketidakpastian, terutama pada jasa

perkreditan mengharuskan adanya pengamanan terhadap kredit yang diberikan agar tidak terjadinya piutang macet.

Pengendalian internal (*internal control*) adalah semua kebijakan dan prosedur yang di rancang untuk mrmberikan keyekinan yang memadai kepada manajemen bahwa organisasi akan mencapai tujuan dan sasaran hal ini di jelaskan oleh krismiaji (2015) mengenai pengendalian internal yaitu **“Pengendalian internal (*internal control*) Adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga aset atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yng akurat dan dapat dipercaya”**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulia Rantika (Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa, Vol 6 No 10 Tahun 2017) dengan judul penelitian “Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Polda Kalbar” hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern piutang anggota unit simpan pinjam primer polda Kalbar berada pada kategori cukup baik. Hal ini terlihat dari kemampuan koperasi dalam melakukan pengendalian. Dari analisis yang diperoleh melalui wawancara dengan ketua koperasi (pengurus) koperasi menunjukkan bahwa: tata cara dan persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi sesuai dengan ketentuan ART (Anggaran Rumah Tangga) yang tertuang dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Bahwa setiap anggota yang ingin meminjam harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Berdasarkan pemaparan fenomena/masalah yng terjadi di Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli dalam latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengendalian Internal Piutang Dalam Meminimalisir Piutang Macet”** .

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perkembangan kredit macet pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Dinas Koperasi 12 Juli.
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya piutang macet
3. Bagaimana pengendalian internal piutang dan piutang bermasalah pada Koperasi Pegawai Dinas Koperasi 12 Juli.
4. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir piutang macet melalui pengendalian intern piutang pada unit simpan pinjam Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan identifikasi masalah diatas tentang pengendalian internal piutang dalam meminimalisir piutang macet pada Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuannya adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana Perkembangan Kredit macet di unit simpan pinjam Pada Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli.
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Piutang macet
3. Bagaiman Pengendalian Internal Piutang dan piutang bermasalah pada Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli.
4. Upaya-upaya apa yang akan dilakukan untuk meminimalisir piutang macet pada pada unit simpan pinjam Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) 12 Juli.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, baik dari segi teoritis maupun segi praktis adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan, manfaat dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai bagaimana pengurus koperasi dalam mengelola unit simpan pinjam khususnya dalam memberikan penyaluran piutang agar tercapainya pengendalian intern piutang yang baik, selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam penelitian yang sama dan dapat di jadikan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak,diantaranya:

1. Bagi Koperasi

Sebagai masukan untuk mengetahui bagaiman pengendalian internal piutang sehingga mampu untuk meminimalisirkan piutang yang macet.

2. Bagi Intitusi

Manfaat dari penelitian bagi Institut Manajemen Koperasi Indonesia adalah dapat memberikan sumbangan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengendalian internal piutang.

3. Bagi Penulis

Memperoleh gambaran langsung tentang bagaimana pengendalian internal piutang dalam meminimalisir piutang macet di koperasi.

IKOPIN